

Pemetaan Konflik Internal dan Demokrasi Di Suriah

Rahmah Daniah

Abstract

The article explores about underlying causes of Syria internal conflict are structural factor, political factor, economy factor and social factor. The fourth factor influence to Syria internal conflict. The other where as the challenges of Syria democracy are lack of trust, the agony of defeat, the persistence of deep divisions, the inside game of politics and the lack of credible commitment. The Results presence Syria democracy after internal conflict needs concern and solution significant could apply good democracy in government, it wasn't instrument power legalization of government interest.

Keyword : Syria, conflict, democracy, government

Pendahuluan

Kondisi kawasan Timur-Tengah memang memiliki kondisi potensial konflik yang cukup rawan dikarenakan tingginya tindakan ancaman militer diambil suatu pihak yang menentang pihak lain. (Sitepu: 2011) Adanya kekuatan berimbang antar kelompok pemerintah dan kelompok oposisi, mekanisme pemerintah yang otoriter, masalah ras-Arab dan non-Arab dan kebangkitan 'Arab Spring' terhadap keberadaan Barat di kawasan Timur-Tengah, sehingga negara-negara di Timur Tengah ini sangat rawan dengan adanya konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal antar negara.

Kebijakan luar negeri Suriah sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Timur-Tengah cenderung agresif terutama dengan negara yang berdekatan, terlihat cukup lama sekitar ±30 tahun Suriah berada di Libanon dengan kondisi geografis Damaskus dengan Beirut yang berdekatan, akibat keberadaan Suriah di Libanon, Suriah dianggap bertanggungjawab atas peristiwa yang menewaskan PM Libanon Rafik Hariri di Beirut (dituduh sebagai pelaku pengeboman mobil), serta menimbulkan reaksi tegas dan keras dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Perancis, momentum ini mengakibatkan perhatian keberadaan Suriah di kawasan Timur-Tengah menjadi cukup signifikan.

Walaupun kebijakan luar negeri Suriah cukup agresif, terutama pada Libanon sampai tahun 2005, kebijakan ini berdampak pada kondisi internal pemerintahan Suriah menjadi tidak kondusif dikarenakan agresif Suriah mempengaruhi kondisi ekonomi dan keamanannya sendiri, akibat pemberlakuan sanksi ekonomi internasional, membuat ekspor minyak Suriah mengalami 'kemacetan' dan menurunnya nilai mata uang £S terhadap US\$.

Konflik internal ini mengarah pada gerakan revolusi rakyat melawan rezim pemerintahan Bashar al-Assad, melalui perkembangan revolusi ini menjadi cukup signifikan sampai sekarang, sehingga artikel ini melihat mengapa konflik terus berlangsung di Suriah? serta bagaimana bentuk dan perkembangan demokrasi di Suriah?

Artikel ini ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konflik internal di Suriah, apa saja alasan yang melatarbelakangi demonstrasi semakin meningkat, sehingga banyaknya korban yang muncul akibat bentrokan pihak oposisi dengan kelompok militer pemerintah. Apakah hal ini dipengaruhi oleh adanya kesalahan mekanisme demokrasi yang dijalankan oleh suatu pemerintah, terutama terlihat pemerintahan yang dijalankan Suriah, hasil dari sebuah pemerintahan anarkhi yang turun temurun dan cukup lama dilakukan oleh klan Al-Assad.

Faktor Pemicu Konflik Internal Suriah

Konflik dalam pandangan Johan Galtung, merupakan sebuah benturan fisik dan verbal dimana akan muncul penghancuran dan konflik juga dianggap sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat (Galtung:1971). Konflik dalam sebuah negara seringkali terjadi akibat sekumpulan permasalahan yang belum terselesaikan antar pihak-pihak yang terkait, seperti antara pemerintah Suriah dengan para kelompok oposisinya.

Keberadaan konflik harus dilihat dalam bentuk menyeluruh karena seringkali pihak-pihak yang terlibat merasa tujuan yang ingin dicapai sebagai bentuk pembenaran dan keadilan, tetapi seringkali pihak yang berseberangan juga merasa sama, sehingga perlu menelaah mengapa konflik harus terjadi pada pihak-pihak tersebut, ketika mereka memiliki tujuan yang sama, tetapi harus berhadapan antara satu dengan lainnya dalam meraih tujuan tersebut.

Konflik yang terjadi pada sebuah negara, seringkali disebut sebagai konflik internal, yaitu sebuah kondisi dalam negeri yang tidak kondusif akibat adanya kesenjangan dan diskriminasi pada unsur politik, masalah ideologi, sosial, pengangguran (ekonomi), sampai pada masalah keamanan dan pertahanan. Posisi negara cukup dilematis ketika terjadi konflik internal, misalnya melakukan kontrol yang terlalu ketat terhadap pihak oposisi, maka negara berhadapan dengan hak kebebasan bersuara, tetapi apabila dibiarkan dan terjadi peningkatan kekuatan pihak oposisi, maka keamanan dan pertahanan kelompok pemerintah semakin melemah.

Konflik internal yang diakibatkan pada masalah politik, biasanya muncul akibat adanya diskriminasi bersuara (kebebasan berpendapat), hak dalam membentuk organisasi, struktur pemerintahan yang cenderung lama dan korupsi, masalah diskriminasi kebijakan antar kelompok mayoritas dan minoritas. Ketidakpuasan terhadap pemerintah bagi kelompok mayoritas yang membentuk kelompok oposisi, seringkali dianggap sebagai kelompok separatis ataupun teroris,

karena keberadaan mereka selalu dianggap ingin memisahkan diri, serta membuat pemerintahan dan negara baru.(Gurr: 1994)

Munculnya pihak oposisi yang melawan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, biasanya dalam bentuk demonstrasi yang tidak menimbulkan korban, tetapi apabila keinginan pihak demonstrasi tidak mampu dikelola oleh pemerintah, maka tentu saja akan menimbulkan kerusakan internal negara yang signifikan, bahkan jumlah korban yang muncul tidak sedikit, hal ini sering mengarah pada perpecahan sikap nasionalisme rakyatnya.

Kerangka analisis konflik internal dari Michael E. Brown (2001), digunakan untuk melihat bahwa ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam munculnya sebuah konflik internal pada Suriah. Dalam kategori penyebab utama konflik internal Suriah, dianalisa akibat dari pemerintah Suriah yang cenderung ‘membiarkan’ penyebab ini berkembang menjadi indikator signifikan.

Tabel.1 Penyebab Utama dalam Konflik Internal dari Michael E. Brown

<p>Faktor-faktor Struktural</p> <p>Negara yang lemah Masalah keamanan negara Geografis etnik (penyebaran etnik dalam wilayah)</p>	<p>Faktor-faktor Ekonomi atau sosial</p> <p>Permasalahan ekonomi (PDB, Pengangguran) Sistem ekonomi yang diskriminatif (kesejahteraan) Pembangunan ekonomi dan modernisasi (industrialisasi dan perubahan sosial)</p>
<p>Faktor-faktor Politik</p> <p>Diskriminatif lembaga politik (otoriter) Ideologi nasional yang eksklusif (nasionalisme) politik antar kelompok (kepentingan) Politik elit (kelompok propaganda)</p>	<p>Faktor-faktor budaya atau persepsi</p> <p>Pola diskriminasi budaya (penghinaan etnis minoritas) Sejarah kelompok yang memiliki masalah (masalah persepsi sejarah masa lalu)</p>

Secara lebih spesifik Brown sebenarnya membedakan antara penyebab utama konflik dan pemicu konflik atau dalam istilah konflik sering juga disebut sebagai akar dan masalah konflik, tetapi penyebab dan pemicu yang ada dalam tulisan ini hampir sama, sehingga agar tidak terjadi *overlapping* antara faktor penyebab dan pemicu, maka tulisan ini akan lebih mengelaborasi pada faktor penyebab konflik internal pada kasus Suriah.

Faktor Struktural

Ketika posisi negara berada pada kondisi lemah, maka yang terjadi pihak oposisi memiliki kekuatan yang melebihi dari kekuatan negara, disini kemudian masing-masing negara berusaha menjaga agar kekuatan pihak oposisi tidak semakin besar.

Masalah yang terjadi di Suriah adalah kemunculan pihak-pihak oposisi ini berkembang cukup lama, pihak oposisi seperti Koalisi Nasional Suriah (SNC) yang diketuai oleh Ahmad Tomeh, memiliki tujuan untuk revolusi Suriah, keberadaan mereka dalam bentuk demonstrasi di jalan, kemudian dibantu dengan kelompok oposisi lainnya, seperti kelompok koalisi Islam (Jabhat Al-Nusra) yang memiliki kedekatan dengan Al-Qaeda. Pihak oposisi lainnya adalah Tentara Pembebasan Suriah (FSA) 'Liwa al-Tauhid', memiliki kekuatan cukup besar terutama di Provinsi Utara Aleppo. Kelompok oposisi lainnya juga muncul dengan nama lainnya, seperti Batalyon Islam (Ahrar Asham) dan Brigade Tauhid.

Munculnya banyak pihak oposisi di Suriah, memperlihatkan bahwa negara berada pada kondisi lemah, apalagi tidak kemampuan membangun kepercayaan dan keinginan dan pihak oposisi, maka kondisi ini juga memicu pada bentrokan semakin meningkat, apalagi kemudian pihak oposisi mulai mencari bantuan kekuatan pada pihak lainnya.

Ketika perimbangan kekuatan pihak oposisi semakin meningkat, terlihat semakin seringnya kelompok ini melakukan demonstrasi, malah seringkali berujung pada tindak kekerasan, maka keamanan internal dan pemerintahan semakin menurun, hal ini terlihat dengan usaha-usaha dari kelompok oposisi berusaha membunuh kepala pemerintahan (Bashar al-Assad) dan terjadi bentrok dengan militer, menimbulkan trauma serta ketakutan dari warga sipil Suriah untuk tetap berada di Suriah, terlihat tingginya jumlah warga sipil Suriah telah meninggalkan wilayah Suriah, seperti meminta perlindungan dan suaka pada negara sekitar Suriah.

Faktor politik internal Suriah

Politik elit yang terjadi di Suriah, merupakan 'warisan' dari elit sebelumnya, terlihat dari naiknya Bashar al-Assad yang menggantikan posisi sebelumnya, yaitu ayahnya Hafez al-Assad yang telah memerintah cukup lama (± 30 tahun, tahun 1971-2000), pemerintahan Bashar al-Assad dibentuk agar kekuasaan pemerintahan tetap berada pada keluarga al-Assad, sehingga pemerintahan sekarang sama saja dengan kondisi pemerintahan sebelumnya.

Bashar al-Assad yang memimpin Suriah sejak tahun 2000 sampai sekarang, memiliki janji lain dalam menjalankan mekanisme pemerintahan Suriah, yaitu ingin lebih modern dan demokratis, beberapa kebijakan liberal yang diambil, seperti membuka 'pintu' impor barang agar barang dalam negeri menjadi lebih murah, mengatasi masalah korupsi dan pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah.

Ideologi nasional Suriah memiliki bentuk sosialisme islam di awalnya, tetapi kemudian dijalankan oleh Bashar al-Assad mengarah pada sikap otoriter pemerintahannya, politik yang dijalankan oleh Bashar al-Assad ternyata tidak jauh berbeda dengan rezim ayahnya, seperti masalah kebebasan media masih dibatasi dengan adanya UU media tahun 2007, sampai pada masalah munculnya blokir situs website sampai tahun 2011.

Demonstrasi yang besar pada tahun 2011 adalah hasil dari kompromi politik antar elit dan kelompok oposisi yang tidak berhasil, mereka memiliki tujuan kenegaraan yang berbeda, seperti keberadaan SNC yang menuduh pemerintahan Suriah telah menjalankan mekanisme pemerintah tidak sesuai dengan kehendak kelompok oposisi ini, kelompok oposisi ini menginginkan pemerintahan Suriah berjalan lebih demokratis dan liberal.

Faktor ekonomi dan sosial internal Suriah

Konflik internal Suriah berdampak pada nilai tukar mata uang Syria Pound (SYP atau £S) terhadap US\$ 1 sebesar £S 136,75. Nilai ini memang tidak berdampak terlalu besar bagi perekonomian Suriah, tetapi kondisi nilai tukar ini mempengaruhi pada kondisi bahan pokok domestik, karena awalnya hanya berada pada kisaran £S 40-50 per US\$ 1.

Kondisi ekonomi lainnya adalah kerusakan infrastruktur dalam menopang pembangunan ekonomi Suriah, lebih dari 35% ekonomi makro Suriah tidak dapat berjalan dengan baik, misalnya seperti kota Aleppo sebagai pusat perdagangan di Suriah, akibat masalah keamanan ini, maka sebagian besar pusat perdagangan ini tidak beroperasi, sehingga muncul masalah yang lain, yaitu masalah pengangguran, akibat dari 'tutupnya' sebagian besar perdagangan di Aleppo, maka diperkirakan sekitar ±2,5 juta jiwa angka pengangguran yang muncul akibat dari konflik internal ini, belum terhitung peningkatan angka para pengungsi yang juga menimbulkan potensi angka pengangguran, bagi negara penerima pengungsi tersebut. (Kompas: 2013)

Merosotnya perekonomian Suriah menjadi salah satu alasan munculnya sikap anti terhadap pemerintahan yang berkuasa, semakin meningkat ketika tingkat kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat Suriah memiliki kesenjangan cukup tinggi dengan nilai kekayaan Bashar al-Assad sendiri, yang memiliki nilai sebesar US\$1,5milyar (Rp.14.4 Triliyun), ditambah lagi penguasaan berbagai aset yang dimiliki oleh keluarga Bashar al-Assad hampir mencapai nilai Rp.1.173 Triliyun, seperti pada aset tanah, energi dan *fee* perizinan, menjadi faktor penting mengapa demonstrasi dari berbagai pihak muncul di Suriah. (Reuters dalam Tempo.co)

Faktor budaya atau persepsi internal Suriah

Perkembangan kebangkitan dunia Arab (musim semi Arab) atau seringkali disebut sebagai '*Arab Spring*', sangat mempengaruhi budaya kelompok etnis di Suriah. Suriah terbagi atas tiga kelompok etnis besar, seperti kelompok mayoritas muslim Sunni (Ahw Sunnah), kelompok Kurdistan dan kelompok minoritas Syiah Alawi.

Masing-masing kelompok ini juga memiliki dukungan dari beberapa negara sekitarnya, seperti kelompok Sunni didukung oleh Arab Saudi, kelompok Kurdistan didukung oleh Irak dan kelompok minoritas muslim Syiah mendapat dukungan dari Iran dan gerakan Hizbullah. Akibatnya pertentangan dari kedua

kelompok mayoritas Sunni dan minoritas Syiah ini cenderung membesar, karena masing-masing kelompok ini memiliki dukungan baik secara internal dan eksternal.

Bashar al-Assad merupakan bagian dari minoritas Syiah dianggap sedang mempertahankan kekuasaannya sampai 'turun temurun', bahkan memperluas kekuasaannya melalui keluarganya yang lebih kepada kelompok Syiah. Kecenderungan yang timpang ini antara kelompok minoritas yang terlalu lama memerintah kelompok mayoritas, sebagai salah satu pemicu gelombang demonstrasi semakin besar.

Konflik Internal Sebagai Tantangan Demokrasi di Suriah

Keberadaan demokrasi bagi sebuah negara agar terjadi sebuah persamaan hak seluruh warga negara, sehingga individu yang sedang berkuasa maupun tidak memiliki hak yang sama, serta hak individu tidak melebihi hak individu lainnya. Demokrasi yang ideal adalah mampu melibatkan seluruh warga negara dalam menghadapi masalah pengambilan keputusan bagi suatu negara, sehingga biasanya mekanisme yang terjadi secara langsung masyarakat terlibat penuh dalam proses sistem politik negara.

Biasanya negara yang baru saja mengalami masa transisi demokrasi, membutuhkan waktu yang panjang dalam membangun mekanisme demokrasi yang seutuhnya, bahkan seringkali rezim demokrasi yang digunakan tidak ideal, tergantung dari sistem politik negara tersebut, apalagi masing-masing pihak yang telah terbiasa dalam 'zona yaman' cenderung menolak demokrasi.

Meminjam pandangan Timothy D. Sisk (1995) dalam menelaah keberadaan demokrasi, ada beberapa tantangan yang perlu dikaji lebih dalam mengenai mekanisme demokrasi yang dijalankan bagi sebuah negara, yang kemudian dapat dianalisa lebih lanjut, seperti :

Pertama, hilangnya kepercayaan masing-masing pihak yang bertikai pasca terjadinya bentrokan antar kedua pihak. Keberadaan pihak oposisi Suriah dikarenakan pemerintahan selalu dimenangkan oleh klan Al-Assad, meskipun terjadi pemilihan umum secara langsung, mekanisme demokrasi dianggap 'cacat' karena pemerintahan al-Assad selalu menang dalam lima dekade.

Muncul persepsi yang kemudian identik dengan Al-Assad selalu menang dengan cara apapun, sehingga meningkatnya sikap apatis dengan pemerintah dikarenakan dalam institusi yang berjalan sesuai dengan keinginan sebagian kelompok saja, seringkali demokrasi dimaknai hanya sebagai pelengkap dan 'ilusi' saja dalam menjalankan pemerintah di Suriah.

Kedua, pihak yang kalah belum mampu menerima kekalahannya, terutama pihak oposisi dari pemerintahan Bashar al-Assad, apalagi kemenangan ini lebih dikarenakan adanya kecenderungan 'kecurangan' pemilihan, terutama pilihan pemerintahan yang dijalankan oleh keluarga al-Assad hampir sama dengan pemerintahan yang dipimpin oleh ayahnya.

Mekanisme demokrasi harusnya mampu menjawab pergantian pemerintahan al-Assad, tetapi ternyata pihak oposisi harus kecewa akibat hasil akhir dari ‘pesta’ demokrasi malah mengukuhkan kembali pemerintahan al-Assad.

Setiap kemenangan dari pihak pemerintahan Al-Assad menjadikan ‘kemarahan’ dari pihak oposisi yang merasa ‘kecurangan’ yang terus berulang, sehingga tidak mampu menerima kekalahan dan terus mencari alat pemicu untuk menjatuhkan rezim pemerintahan yang sedang berjalan.

Ketiga, etnis mayoritas cenderung sulit berkompromi karena merasa lebih kuat dan sulit menghilangkan sifat tersebut kedalam bentuk nasionalisme. Keberadaan etnis mayoritas Muslim Sunni yang didukung oleh ras Arab (Arab Saudi), cenderung menolak mekanisme pemerintah dijalankan kembali oleh pemerintah yang didukung oleh etnis minoritas Syiah Alawi.

Posisi ini memang tidak mudah, meskipun dalam kerangka demokrasi masing-masing kelompok telah berada pada ‘zona yaman’, tidak mudah membagi kelompok etnis mayoritas dan minoritas untuk berada di daerah yang sama, seperti penguasaan kota Aleppo oleh kelompok Sunni yang sudah cukup lama, tidak mudah membagi daerah pada dua kelompok besar karena pertikaian dan konflik akan selalu muncul, ‘menyatukan’ atau merubah kondisi wilayah kota ini tidak seperti semula, karena masing-masing kelompok telah dipengaruhi pandangan demokrasi yang berbeda.

Semakin kuat suatu kelompok maka akan semakin dominasi terhadap kekuasaan, menjadikan oposisi dari kelompok tersebut membuat dan menggalang kekuatan yang sama, agar posisi kekuatan antar kelompok ini bisa sebanding, berbagai cara dilakukan dalam menggalang kekuatan tersebut, sampai berujung pada setiap bentrokan di wilayah yang sama apabila ada dua kelompok besar didalamnya.

Keempat, masih adanya ‘permainan politik’ dan kepentingan kelompok yang bermain didalamnya, posisi demokrasi dianggap sebagai ‘jalan’ kompetisi untuk memenuhi kepentingan antar kelompok, walaupun demokrasi dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi ternyata pada akhirnya penempatan posisi strategis adalah seorang yang memiliki kepentingan yang sama dengan penguasa, apabila tidak maka tidak masuk dalam ‘*layer*’ kekuasaan tersebut.

Kondisi politik tidak seimbang menjadikan para pengikut Al-Assad harus sangat loyal dan mampu melakukan apapun dan memberikan dukungan penuh agar mampu bertahan cukup lama di pemerintahan atau ‘*layer*’ kekuasaan, sedangkan yang bukan loyalis dari Al-Assad ditempatkan sebagai pihak diluar pemerintahan saja. Mekanisme pemerintahan kemudian tidak mampu berjalan dengan baik cenderung mengarah pada otoriter yang dipicu oleh kondisi pemerintahan hanya para pengikut Al-Assad saja.

Mekanisme demokrasi dijadikan ajang menempatkan kolega, keluarga dan kelompok kepentingan loyalis Al-Assad agar kekuasaan tetap berpihak, terlihat

pada jumlah keluarga al-Assad yang terlibat pada mekanisme pemerintahan Suriah, sehingga memaknai keberadaan demokrasi hanya dianggap sebagai 'alat pelegalan' dalam mendapatkan dan memperluas kekuasaan.

Kelima, tidak adanya komitmen yang dipercaya antar pihak tersebut, ketika ingin menyelesaikan pertentangan keduanya karena selalu muncul tindakan kekerasan baik penggunaan senjata konvensional, bentrokan yang menimbulkan jumlah korban yang tidak sedikit diantara kedua pihak.

Pertemuan perjanjian perdamaian yang selalu dijanjikan masing-masing pihak selalu gagal dan selalu berujung pada bentrokan, masing-masing pihak membutuhkan komitmen yang serius untuk menyelesaikan kekerasan ini. Apabila setiap perjanjian antar kelompok bertikai tidak disertai dengan komitmen tinggi pada kelompok yang sedang bertikai, maka perselisihan ini selalu terjadi.

Komitmen ini akan terasa lama sekali muncul, meskipun 'meja perundingan' selalu disiapkan dan diharapkan memberikan masukan positif, tetapi terus menerus gagal. Pihak-pihak ini 'terkunci sikap menolak dan tidak saling percaya' pada kondisi apapun dikarenakan permasalahan berlangsung sudah cukup lama dan cenderung dibiarkan oleh pemerintah yang menjalankan kekuasaan.

Meja perundingan hanya sebagai siasat untuk membuat pihak lawan datang untuk mampu mengetahui siapa 'musuh' sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam pemerintahan dan kekuasaan, tetapi belum ada kepastian akan sebuah keputusan bersama yang mampu meredam konflik yang terjadi, ketika pertemuan ini berlangsung dan setelah pertemuan berakhir, tetapi pertikaian di Suriah tetap terjadi dan masyarakat sipil yang menjadi korban semakin besar jumlahnya.

Kesimpulan

Ada empat faktor pemicu utama konflik internal yang terjadi di Suriah, diantaranya yaitu faktor struktural, faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial, hal ini menyebabkan konflik internal di Suriah berlangsung cukup lama, kondisi internal di Suriah diperparah pada keberlangsungan pemicu konflik internal ini yang 'dibiarkan' dalam waktu yang lama tanpa adanya penyelesaian yang positif.

Selain dipicu oleh pemicu faktor konflik internal yang signifikan di Suriah, juga disebabkan oleh kondisi demokrasi yang sangat tidak baik, seperti keberadaan demokrasi dianggap gagal dijalankan dikarenakan tidak sesuai dengan fungsi dari demokrasi itu sendiri, sehingga banyak pihak oposisi menolak secara apatis bahwa demokrasi yang dijalankan hanya sebagai alat pelegalan dari berbagai kepentingan kekuasaan yang diinginkan oleh pemerintahan Al-Assad.

®Rahmah Daniah adalah Staf Pengajar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, email: daniarahm@gmail.com

Daftar Pustaka

- Brown, Michael E., 1996, "The Cause and Regional Dimensions of Internal Conflict" dalam Michael E. Brown (ed.), *The International Dimensions of Internal Conflict*, MIT Press, Massachusetts.
- Collier, P dan A. Hoeffler, 2001, *Greed and Grievance in Civil War*, World Bank Working Paper No.2355, Washington DC, USA : World Bank
- Fr. Ramon Ma. G. Bernabe, OMI., 2003, *Democratization in the ARMM*, Institute For Autonomy and Governance, Konrad Adenauer-Stiftung, No. 2
- Oyangoda, Jayadeva (ed), 2000, *Conflict Resolution and Peace Studies: An Introductory Handbook*, Colombo, CEPRA University of Colombo.
- Ted Robert and Barbara Harff, 1994, *Ethnic Conflict in World Politics*, United States of America: Westview Press Inc.
- Galtung, Johan, 1971, *a Structural Theory of Aggression*, *Journal a Peace Research*, *Why Men Rebel*, Princeton University Press, New Jersey.
- Kollock, Peter, 1998, *Social Dilemmas: The Anatomy of Cooperation*, by Annual Reviews, *Annu. Rev. Social*, 24: 183 - 214
- Miall, Hugh *et all.*, 2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fisher, Simon, *et all.*, 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta : The British Council
- Sitepu, P. Anthonius, 2011, *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sisk, Timothy, Democratization and Peacebuilding, Peril and Promise, dalam Chester A. Crocker, at.al, 2001, *'Turbulent Peace: the Challenges of Managing International Conflict'*, United States Institute of Peace Press, Washington DC.
- Internasional.kompas.com/read/2013/07/01/1636271/Dua.Tahun.Berperang.Kerugian.Suriah.Tembus.Rp.150.Triliyun.
- www.tempo.co/read/news/2011/05/04/117332055/Pundi-Pundi-Para-Diktator-di-Bank-Swiss